



Bantuan Jadi Lebih Tepat Sasaran

Kemendikbud Luncurkan Smartcard KIP

YOGYA, TRIBUN - Menjawab permasalahan yang kerap terjadi terkait penyaluran dan pencairan bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bekerjasama Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Negara Indonesia (BNI) meluncurkan *smartcard* Kartu Indonesia Pintar (KIP) elektronik atau KIP Plus, Rabu (19/10), di tiga sekolah di Kota Yogyakarta.

Dalam hal ini, Kota Yogyakarta dipilih sebagai *pilot project* pelaksanaan uji coba penyaluran bantuan pendidikan secara non tunai atas dasar ketersediaan infrastruktur perbankan yang memadai di kota ini.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen), Hamid Muhammad, dalam sambutannya pada peluncuran KIP Plus di SMAN 9 Yogyakarta, menyampaikan bahwa KIP plus hadir menjawab beberapa hal yang jadi tantangan KIP terkait akurasi data, proses penyaluran dan pencairan, serta penggunaan dana bantuan PIP.

Selama ini, terang Hamid, KIP paling ramai dibicarakan oleh khalayak luas. Persoalan data misalnya. Banyak masalah diterima Kemendikbud terkait KIP, dimana data penerima KIP dinilai banyak pihak salah sasaran. Kemudian terkait penyaluran dana yang dinilai terlambat dan tak tepat waktu.

Lalu, menyoal penggunaan dana digunakan untuk apa dana yang sudah disalurkan tersebut? Apakah benar-benar digunakan siswa untuk keperluan pendidikan? Maka dari itu, hadir lah KIP Plus tersebut yang diharapkan dapat mewujudkan program bantuan sosial yang memenuhi prinsip 6T, yaitu Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi,

dan Tepat Kualitas.

Target dari KIP adalah agar anak usia sekolah yang tidak sekolah bisa kembali bersekolah, dan jangan sampai yang sudah menempuh pendidikan kemudian putus sekolah. Dan KIP Plus menjawab beberapa hal yang jadi tantangan KIP, pertama soal akurasi data. Setiap anak yang terima KIP Plus, datanya pasti valid, karena tak mungkin bank mengeluarkan dana kalau data tak lengkap. Kedua, penyaluran lebih ketat karena tak ada tahapan panjang yang harus melalui koordinasi banyak pihak. Ini memperlancar penyaluran dan pencairan," terang Hamid.

Plus di Sekolah Yogyakarta

Alat transaksi

Selain sebagai media penyaluran dana bantuan PIP, KIP Plus juga dapat digunakan sebagai alat transaksi keuangan. Jadi, terdapat dua kantung dana pada KIP Plus, yaitu dana bantuan pendidikan PIP dan tabungan personal siswa. Siswa pemilik KIP Plus dapat menggunakannya untuk berbelanja keperluan belajar di *merchant* yang ditunjuk oleh bank ataupun di koperasi sekolah yang memiliki fasilitas mesin Electronic Data Capture (EDC).

Terang Hamid, lima puluh persen dana bantuan PIP dapat digunakan untuk transaksi nontunai, membeli per-

lengkapan yang dibutuhkan siswa untuk belajar. Lima puluh persen sisanya dapat dicairkan untuk memenuhi kebutuhan siswa seperti biaya transportasi.

Dengan kehadiran *smart-card* tersebut dirinya pun berharap koperasi sekolah akan kembali hidup dengan sistem modern yang dikembangkan sekaligus mendorong literasi keuangan sejak dini di sekolah. Dengan perilaku seperti itu, maka anak akan mulai terbiasa dan membawanya terus hingga dewasa kelak.

Senada dikatakan Direktur Program Elektronifikasi dan Keuangan Inklusif Bank Indonesia (BI), Pungki Purnomo, saat konferensi pers KIP Plus di SMKN 2 Yogyakarta. Terang Pungki, KIP Plus akan melatih pelajar dalam mengelola pengeluaran karena tak semua dana bantuan dapat dicairkan secara tunai. Dengan sistem penguncian rekening, diharapkan siswa akan lebih bijaksana dalam merencanakan pengeluarannya.

"Tak semua bisa dicairkan dalam tunai karena rekening dikunci. Ini akan menjadi proses belajar siswa untuk bisa lebih bijaksana dalam merencanakan pengeluaran dengan baik," tambah Pungki.

Masa uji coba KIP Plus tersebut pun akan berlangsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. Sebagai tahap awal, Kemendikbud bersama BRI dan BNI telah menyerahkan 1295 KIP Plus kepada sebagian siswa penerima PIP di Yogyakarta, dengan rincian untuk siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 629 kartu, siswa SMA sebanyak 142, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 524 kartu. Lebih kurang 150 mesin EDC telah disiapkan BRI dan BNI untuk dapat menerima transaksi menggunakan KIP Plus di Yogyakarta. (ana)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005